



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA



PSKN-FH
UNIVERSITAS PADJAJARAN

JURNAL KONSTITUSI

PSKN-FH UNIVERSITAS PADJAJARAN

Volume I Nomor 1, November 2009

- Reformasi Sistem Perwakilan Indonesia
Susi Dwi Harijanti

- Kaji Ulang Tolak Ukur Penetapan Daerah Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah
H. Rosjidi Ranggawidjaja

- Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya Hukum Terakhir dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum
Rahayu Prasetianingsih

- Kedudukan Komisi Independen sebagai *State Auxiliary Institutions* dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia
Miranda Risang Ayu

- Disparitas Suatu Peraturan Daerah Dinyatakan Batal dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum dengan Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum
H. Kuntana Magnar

- Implikasi Hukum dari Eksistensi Peraturan Menteri terhadap Peraturan Daerah dalam Pemberlakuan Prinsip Hierarki Peraturan Perundang-Undangan
Agus Kusnadi

11



SEKRETARIAT JENDERAL DAN KEPANITERAAN
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Musa
19/6/2012



PSKN-FH
UNIVERSITAS PADJAJARAN

F. Oene

24/11-2012

[Signature]
13/1/2012
/6

JURNAL KONSTITUSI

PSKN - FH UNIVERSITAS PADJAJARAN

Membangun konstiusionalitas Indonesia
Membangun budaya sadar berkonstitusi

Volume I Nomor 1
November 2009

Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara pengawal konstitusi dan penafsir konstitusi demi tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cita negara hukum dan demokrasi untuk kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat. Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu wujud gagasan modern dalam upaya memperkuat usaha membangun hubungan-hubungan yang saling mengendalikan dan menyeimbangkan antar cabang-cabang kekuasaan negara.

DITERBITKAN OLEH :
**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Telp. (021) 2352 9000
Fax. (021) 3520 177

PO BOX 999
Jakarta 10000

TIDAK DIPERJUALBELIKAN

Pengantar Redaksi	5
<input type="checkbox"/> Reformasi Sistem Perwakilan Indonesia Susi Dwi Harijanti	9
<input type="checkbox"/> Kaji Ulang Tolok Ukur Penetapan Daerah Pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah H. Rosjidi Ranggawidjaja	27
<input type="checkbox"/> Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi Sebagai Upaya Hukum Terakhir dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Umum Rahayu Prasetianingsih	37
<input type="checkbox"/> Kedudukan Komisi Independen Sebagai <i>State Auxiliary Institutions</i> dan Relevansinya dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia Miranda Risang Ayu	53
<input type="checkbox"/> Disparitas Suatu Peraturan Daerah Dinyatakan Batal dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum dengan Dapat Dibatalkan dan Batal Demi Hukum H. Kuntana Magnar	73
<input type="checkbox"/> Implikasi Hukum dari Eksistensi Peraturan Menteri Terhadap Peraturan Daerah dalam Pemberlakuan Prinsip Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Agus Kusnadi	81
Biodata Penulis	97
Ketentuan Penulisan Jurnal Konstitusi	99

**Opini yang dimuat dalam jurnal ini tidak mewakili
pendapat resmi MK & Pengelola Jurnal**

KEDUDUKAN KOMISI INDEPENDEN SEBAGAI STATE AUXILIARY INSTITUTIONS DAN RELEVANSINYA DALAM STRUKTUR KETATANEGARAAN INDONESIA¹

Miranda Risang Ayu²

Abstract

In the modern states, societies demand the governments to be more effective and efficient in the exercise of their functions as the public service providers. So, states create various states' auxiliary organs as the additions, assistances or supporting institutions to the governments. Indonesia is considered to have various forms of institutions of this kind. The legal bases of the establishments of these institutions are different and ambiguous, especially related to their independence status. The aim in establishing these institutions are different, due to different problems, but the facts so far have proven that there have been frictions between the related institutions. It is important to investigate the grand design of the Indonesian government institutions to determine the position of the state auxiliary institutions.

The position of the states auxiliary institutions in the whole governmental structure in Indonesia is in between the governmental political sphere (supra-structure) in the upper side and the socio-political sphere (infra-structure) in the lower side.

¹ Penulis mengucapkan terima kasih kepada Sdri. Lailani Sungkar, S.H. yang telah membantu penulisan tulisan ini.

² Dosen Fakultas Hukum Unpad, mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Hukum Unpad, Master of Laws (LL.M) dan Ph. D dari *The University Technology of Sidney*.

This position reflects the main objective of their establishments to make bridging tools between the power of the societies and the power of the governments. These independent institutions are not totally separated from the main governmental institutions. The positions of the state auxiliary institutions which have not had clear independences become ambiguous in the whole governmental structure. This fact causes the current development of these institutions in Indonesia become irrelevant with their roles in the governmental structure.

Key Word : Governments, Commission, Auxiliary, Independent

A. Pendahuluan

State auxiliary institutions secara harfiah diartikan sebagai “lembaga negara bantu.”³ Dalam *Black’s Law Dictionary* tidak ditemukan definisi *State auxiliary institutions* sebagai sebuah frase, namun dapat dilihat melalui penggalannya. *Institution* adalah “*an established organization, especially one of public character (public institution).*”⁴ *Auxiliary* adalah “*1. adding or supporting, 2. Subordinary.*”⁵ Ada pula yang menyebut lembaga *auxiliary* ini sebagai *administrative agency*.⁶ *Administrative agency* dalam *Black’s Law Dictionary* diartikan “*government body with the authority to implement and administer particular legislation.*”⁷ Dalam kamus hukum lain juga dikemukakan arti *administrative agency* yang lebih detail yaitu :⁸

“An official governmental body empowered with the authority to direct and supervise the implementation

³ Firmansyah Arifin dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: KRHN, 2005), hlm. 50

⁴ Bryan A. Garner, *Black’s Law Dictionary*, (St.Paul-Minn: West Publishing,1999).

⁵ *Ibid.*

⁶ Daniel E. Hall, *Constitutional Law Case and Commentary*, (United State of America: Delmar Publishers, 1997), hlm. 285.

⁷ Bryan A. Garner, *Loc Cit.*

⁸ <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Administrative+Agency>